



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-02.OT.03.01 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, maka perlu diterapkan manajemen perubahan pada setiap lini organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 10 /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan baik ditingkat unit pusat maupun unit daerah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI ;
 - c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dianggap mampu menjadi anggota Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Management Knowledge*);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
15. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.PR.02.02-2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

KEDUA : Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas:

1. Sebagai katalis, yaitu berperan meyakinkan para pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai pemberi solusi, yaitu : memberikan alternatif solusi bagi pegawai di lingkungannya masing-masing yang mengalami kendala/ hambatan dalam proses perubahan menuju sasaran ;
3. Sebagai mediator, yaitu : membantu kelancaran proses perubahan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang muncul pada pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya dan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perubahan, diluar Kementerian Hukum dan HAM;

4. Sebagai penghubung sumber daya, yaitu menghubungkan pegawai yang ada di lingkungannya masing-masing kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan;
5. Sebagai role model, yaitu sebagai individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (mind set) dan budaya kerjanya (culture set) dalam proses perubahan di lingkungan masing-masing;
6. Sebagai pemangku kepentingan, yaitu sebagai individu/kelompok yang memiliki kepentingan serta dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu;
7. Menciptakan strategi komunikasi yaitu menciptakan cara yang terbaik untuk menyampaikan informasi perubahan, baik program atau kebijakan dari pihak internal (agen perubahan) kepada pihak eksternal (Kementerian Hukum dan HAM RI serta K/L lain yang terkait).

- KETIGA** : Menunjuk pejabat/ pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melaksanakan tugasnya selama 12 (dua belas) bulan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 September

2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



PATRIALIS AKBAR, SH, MH

Tembusan :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI ;
6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ;
7. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ;
8. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI ;
9. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ;
10. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI ;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ;
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI;
14. Para Kakanwil di seluruh Indonesia;

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2011
Tanggal : 20 September 2011

**Anggota Satuan Tugas Agen Perubahan
Kementerian Hukum dan HAM RI**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT/SATUAN KERJA
1	DRS. MAHYADI, SH	19661203 198903 1 001	KABAGUM	Kanwil Banda Aceh
2	RAHMAD TARIGAN	19550627 198603 1 001	KABAGUM	Kanwil Sumatera Utara
3	WARUDJU GP	19631115 199103 1 001	KABAGUM	Kanwil Riau
4	SYAFRUDDIN	19591210 198303 1 002	KABAGUM	Kanwil Kepulauan Riau
5	FEBRIANDI	19701210 199203 1 002	KABAGUM	Kanwil Sumatera Barat
6	MARULI	19580509 198803 1 001	KABAGUM	Kanwil Jambi
7	ERFAN, SH, MH	19630214 199203 1 001	KABAGUM	Kanwil Sumatera Selatan
8	DARMONO ADI, SH	19580371 198903 1 001	KABAGUM	Kanwil Kep. Bangka Belitung
9	DRS. JONI AKMAL, MM	19610425 198301 1 001	KABAGUM	Kanwil Bengkulu
10	BASNAMARA, SH, MH	19700926 199003 1 001	KABAGUM	Kanwil Lampung
11	AGUNG BUDIYANTO SSos MSi	19640430 199001 1 001	KABAGUM	Kanwil Banten
12	MAKTUB, SH, MH	19630202 199103	KABAGUM	Kanwil DKI Jakarta
13	AHMAD KAPI	19660314 199903 1 001	KABAGUM	Kanwil Jawa Barat
14	SUSILO PRAMONO	19590506 198003 1 001	KABAGUM	Kanwil Jawa Tengah
15	SLAMET SUPRIYADI, SPd, MM	19600415 198003 1 001	KABAGUM	Kanwil DI Yogyakarta
16	DRS. IMAM JAUHARI, MH	19630823 199203 1 001	KABAGUM	Kanwil Jawa Timur
17	TARSAN MANIHURUK	19650204 198603 1 002	KABAGUM	Kanwil Kalimantan Barat
18	SUDARTO, SE	19521212 197902 1 002	KABAGUM	Kanwil Kalimantan Tengah
19	SURYANTO	19551228 198203 1 001	KABAGUM	Kanwil Kalimantan Selatan
20	SUTRISNO	19650120 198503 1 003	KABAGUM	Kanwil Kalimantan Timur

21	MANUS JOHNLY	19600909 198103 1 001	KABAGUM	Kanwil Sulawesi Utara
22	TITO SAPTO AGUS S	19570817 197603 1 001	KABAGUM	Kanwil Gorontalo
23	MARSUKI P, SH	19650420 199403 1 001	KABAGUM	Kanwil Sulawesi Tengah
24	MUH. SAID	19560405 199403 1 001	KABAGUM	Kanwil Sulawesi Barat
25	SIRAJUDDIN	19621231 198412 1 001	KABAGUM	Kanwil Sulawesi Selatan
26	BONTHINY	19621227 198303 1 002	KABAGUM	Kanwil Sulawesi Tenggara
27	DRS. I WAYAN REDANA, MH	19671120 199303 1 001	KABAGUM	Kanwil Bali
28	ANDI MURKA	19641231 198903 1 005	KABAGUM	Kanwil Nusa Tenggara Barat
29	MELKIAS SEPTORY	19580512 198302 1 002	KABAGUM	Kanwil Nusa Tenggara Timur
30	AJAR ANGGONO	19660314 198603 1 001	KABAGUM	Kanwil Maluku Utara
31	SALMAN RATUPURRY	19660604 199403 1 002	KABAGUM	Kanwil Maluku
32	YANU HARYADI, SH	19660114 199203 1 001	KABAGUM	Kanwil Papua Barat
33	TANTO ROBERTH, SH	19591102 198103 1 001	KABAGUM	Kanwil Papua
34	ZAKARIA	19590421 198503 1 001	KAKANIM	Kanim Banda Aceh
35	ABDUL GAFUR	19600209 198403 1 001	KABAG TU	Kanim Sumatera Utara
36	YONGKI M ZEIN	19640221 198503 1 001	KABAG TU	Kanim Riau
37	ADJIE INDRAWARMAN	19540329 197803 1001	KAKANIM	Kanim Kepulauan Riau
38	HARMEN	19590113 198503 1 001	KANIM	Kanim Sumatera Barat
39	ZARDIANTO	19580109 197810 1 001	KABAG TU	Kanim Jambi
40	HERIYANTO	19600129 198503 1 001	KAKANIM	Kanim Sumatera Selatan
41	MUNTHOWIF	19590802 197903 1 001	KAKANIM	Kanim Kep. Bangka Belitung
42	MAHARUDIN	19661224 199203 1 002	KASUBAG TU	Kanim Bengkulu
43	MAT DAURI	19640103 198503 1 001	KASUBAG TU	Kanim Lampung
44	RITA KUSUMA ASTUTI	19770621 200003 2 001	KASUBAG TU	Kanim Banten
45	SONDANG DAME	19600120 198302 2 001	KASUBAG TU	Kanim DKI Jakarta
46	ALI ROHMAN	19600409 198503 1 001	KAKANIM	Kanim Jawa Barat
47	HAMZAH	19590807 198403 1 001	KAKANIM	Kanim Jawa Tengah
48	ENI INDRIYANTI	19610819 198503 2 002	KASUBAG TU	Kanim DI Yogyakarta
49	HARI AGUNG AP	19660816 198603 1 001	KASUBAG TU	Kanim Jawa Timur
50	MAS AGUS SANTOSO	19590830 197811 1 001	KAKANIM	Kanim Kalimantan Barat
51	I DEWA K.S	19570501 197403 1 001	KAKANIM	Kanim Kalimantan Tengah
52	NANA RESMANA	19560418 198001 1 001	KAKANIM	Kanim Kalimantan Selatan
53	ZAEROJI	19621101 198503 1 002	KAKANIM	Kanim Kalimantan Timur

54	LUMAKSONO	19610814 198403 1 001	KAKANIM	Kanim Sulawesi Utara
55	M. Jaelani	19740308 199803 1 001	KASUBAG TU	Kanim Gorontalo
56	Arman Andria	19590927 198403 1 002	KAKANIM	Kanim Palu
57	Ali Yamang Hasan	19571231 197412 1 001	KAKANIM	Kanim Sulawesi Barat
58	M Yunus Junaid	19561005 198103 1 001	KAKANIM	Kanim Sulawesi Selatan
59	MUH. NUR	19621120 198603 1 001	KABAG TU	Kanim Sulawesi Tenggara
60	AS'ARI	19580908 197912 1 001	KABAG TU	Kanim Bali
61	SURYONO	19711105 199103 1 001	KASUBAG TU	Kanim Nusa Tenggara Barat
62	Soleman M. Feoh	19650207 198503 1 001	KASUBAG TU	Kanim Nusa Tenggara Timur
63	ARI BUDIJANTO	19600211 198503 1 001	KAKANIM	Kanim Maluku Utara
64	Rinaldo Niatauseja	19670720 1994 1 001	KASUBAG TU	Kanim Maluku
65	HERMANTO BATUBARA	19561224 198303 1 001	KASUBAG TU	Kanim Papua
66	ERRY TARUNA DS	19641120 198811 1001	KALAPAS	Lapas Banda Aceh
67	RITauli Situmeang, SH	19630517 198403 1001	KABAG TU	Lapas Sumatera Utara
68	AGUS TOYIB	19630617 198503 1002	KALAPAS	Lapas Riau
69	SUTRISMAN	19600402 198303 1001	KALAPAS	Lapas Kepulauan Riau
70	ZAMRI EPI, SH	19651225 198803 1002	KAUR UMUM	Lapas Sumatera Barat
71	YOSRIZAL	19590118 198103 1002	SUBBAG TU	Lapas Jambi
72	ILHAM DJAYA	19640630 200912 1002	KALAPAS	Lapas Sumatera Selatan
73	SRI PAMUDJI	19590814 198303 1002	KALAPAS	Lapas Kep. Bangka Belitung
74	ABDUL ARIS	19630106 198503 1002	KALAPAS	Lapas Bengkulu
75	FIRMAN H	19702703 199103 1001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	Lapas Lampung
76	ETTY N	19570727 198103 2001	KALAPAS	Lapas Banten
77	JUANDA Tambunan, SH, MSi	19610912 199903 1002	KASUBBAG TU	Lapas DKI Jakarta
78	BUDI SARWONO	19630127 198703 1002	KALAPAS	Lapas Jawa Barat
79	A. MIRZA	19580925 198002 1001	KALAPAS	Lapas Jawa Tengah
80	B. SUKAMTO	19570520 198103 1001	KALAPAS	Lapas DI Yogyakarta
81	PRAYITNO	19720416 199403 1002	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	Lapas Jawa Timur
82	INDRA SOFYAN MS	19660520 199403 1003	KALAPAS	Lapas Kalimantan Barat
83	SRIYADI	19560607 1982 1003	KALAPAS	Lapas Kalimantan Tengah
84	LUKMAN HENDRO	19841004 198503 1001	KASIMIN KAMTIB	Lapas Kalimantan Selatan
85	MULYANTO	19570914 198203 1001	KALAPAS	Lapas Kalimantan Timur

86	Y. WASKITO	19651012 198802 1001	KALAPAS	Lapas Sulawesi Utara
87	SUNARTO	19580203 198403 1002	KALAPAS	Lapas Gorontalo
88	JOHANIS TANGKUDUNG	19650711 198811 1001	KALAPAS	Lapas Sulawesi Tengah
89	SUYATNA	19620813 198603 1002	KALAPAS	Lapas Sulawesi Barat
90	ADI PUTRANTO	19560111 197503 1001	KALAPAS	Lapas Sulawesi Selatan
91	SAIBUDDIN	19741213 199903 1001	KASUBBAG TU	Lapas Sulawesi Tenggara
92	DEWA GEDE ASTARA	19641214 198503 1001	KAUR KEPEGAWAIAN & KEUANGAN	Lapas Bali
93	JULIATIN KRISTIANINGRUM	19730406 199203 2001	KAUR KEPEGAWAIAN & KEUANGAN	Lapas Nusa Tenggara Barat
94	HENI YUWONO	19650605 198811 1001	KALAPAS	Lapas Nusa Tenggara Timur
95	M. AGUS SHALEH	19651104 198811 1001	KALAPAS	Lapas Maluku Utara
96	FARID JUNAEDI	19691021 199303 1001	KALAPAS	Lapas Maluku
97	YOSEF	19670623 199610 1001	KALAPAS	Lapas Papua Barat
98	LIBERTI SITINJAK	19640701 199103 1001	KALAPAS	Lapas Papua

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



PATRIALIS AKBAR, SH, MH